

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan peninggalan peninggalan kerajaan, hampir setiap wilayah di Nusantara, dan setiap kerajaan mempunyai kekuasaan maupun maksud tertentu dengan jumlah yang cukup besar sekitar 802 (delapan ratus dua) kerajaan terlepas kerajaan-kerajaan kecil yang tidak sempat terhitung atau sudah hilang tilas tertelan jaman.

Di wilayah Madiun banyak tempat peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kerajaan kerajaan nusantara pada masa lalu. Salah satunya di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mempunyai nama Kerajaan Gelang-Gelang yang di pimpin oleh Bupati bernama Jayakatwang atau disebut dengan nama Jayakatong, Aji Katong, Jayakatyeng. Di dalam berita Cina ia disebut Ha-ji-ka-tang.¹

Hampir disetiap tempat peninggalan kerajaan mempunyai mitos yang di percayai oleh penduduk sekitar, hal ini sama antara mitos yang ada di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan Kediri.

¹ Soedjipto Abimanyu, Babat Tanah Jawi, Hal 145

Di Kediri mitos presiden RI yang dilarang datang ke kota Kediri sepertinya masih kuat dipercaya, mitos tersebut meyakini bahwa presiden RI yang nekat ke sana bakal lengser. Dari enam presiden di negeri ini, hanya Soekarno, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gusdur dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang berani masuk ke Kediri.

Sebagaimana dilansir waktu tiga hari usai melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Lerboyo Kediri, Gusdur lengser dari jabatan. Begitupun juga Presiden BJ Habibie yang lengser setelah tak lebih dari tiga bulan datang ke Kediri.

Keangkeran Kediri bagi kunjungan presiden juga pernah diakui mantan Presiden Soeharto. Selama tiga puluh dua tahun memimpin Indonesia, beliau tidak sekalipun berani datang ke Kediri. Hal itu diamini intelijen TNI dan Polri, rata-rata Presiden tidak berani masuk wilayah Kota Kediri.²

Di yakini juga dan bukti kuat Kerajaan Gelang-Gelang ada sangkut pautnya dengan kerajaan Kediri, maka mitos di sekitar kejajaan Kediri sama dengan mitos di sekitar peninggalan kerajaan Gelang-Gelang yang ada di Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

² <https://simomot.com/2014/07/02/mitos-presiden-dilarang-kunjungi-kota-kediri-bisa-lengser-secara-politis/>. Diakses 18 September 2016. Pukul 07.20

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis tentang keberadaan mitos di sekitar peninggalan kerajaan Gelang-Gelang di Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah masuk ke Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun jika terhalang oleh Mitos?
3. Bagaimana respon Pemerintah Desa Dolopo terkait mitos yang ada di Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis tentang keberadaan mitos di sekitar peninggalan kerajaan Gelang-Gelang di Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah masuk ke Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun jika terhalang oleh Mitos.
3. Untuk mengetahui bagaimana respon Pemerintah Desa Dolopo terkait mitos yang ada di Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.?

D. Manfaat penelitian

1. Bagi masyarakat : Dengan penelitian ini di harapkan bisa menjadi manfaat dan pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat Dolopo dan Madiun khususnya

terkait dengan keberadaan mitos yang ada di Dusun Ngerwan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini.

2. Bagi Akademik : sekiranya bisa menjadi suatu pemasukan ilmu pengetahuan, wawasan dan bacaan mengenai keberadaan mitos di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Bagi Pemerintah Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan penelitian ini di harapkan Bisa lebih mempertimbangkan kembali atas mitos yang ada di Dusun Ngerawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabbupaten Madiun.

E. Penegasan Istilah

1. Analisi adalah memahami segala informasi yang ada dalam sebuah kasus untuk mengetahui isu yang sedang terjadi kemudian memutuskan tindakan apa yang harus di kerjakan dengan tujuan menyelesaikan masalah (Boulton dalam Freddy Rangkuti, 1997:14). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3 Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagi dan penelaahan bagian itu, serta berhubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara menyeluruh.
2. Kerajaan Gelang-Gelang adalah nama Kerajaan yang pernah ada di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada masa Kerajaan Kediri, singosari dan Majapahit

3. Peninggalan artinya barang atau jasa yang tersisa pada zaman dahulu atau orang terdahulu
4. Kerajaan adalah suatu kekuasaan di tempat tersebut yang di pimpin oleh seorang Raja dan pengikutnya dengan bertujuan tertentu dan tujuan yang jelas
5. Mitos artinya sebuah cerita atau dongeng berlatar masa lampau. Orang pertama yang mengenalkan istilah mitos adalah Plato seorang filsuf dan matematika Yunani. Istilah Mitos berasal dari kata Yunani *Mythos* dan bahasa Belanda *mita* yang berarti cerita atau perkataan. Penutur mitos terlebih dahulu telah mendengar cerita tersebut dari generasi sebelumnya, biasanya terdapat penokohan para dewa yang terjadi di dunia lain (kayangan) dan di hubungkan terjadinya di suatu tempat, alam semesta, adat istiadat dan dongeng masa lampau.

F. Landasan Teori

1. Analisis Kebijakan

Pembuatan kebijakan publik merupakan bagian dari salah satu proses dalam menjalankan fungsi daripada suatu lembaga atau institusi. Pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang sulit dan rumit, bahkan Charles Lindblom menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik sejatinya merupakan proses politik yang sangat beragam dan membutuhkan proses analisis, di samping itu juga kebijakan publik merupakan sesuatu yang tidak mengenal kapan diawali dan kapan diakhiri.

Di dalam suatu konsep kebijakan, kebijakan publik dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis kebijakan, dan banyak para pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangannya masing-masing. James Anderson (1979) misalnya di dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making*, yang telah diterjemahkan, menyampaikan beberapa kategori tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan kasus ini, diantaranya:

- Kebijakan Substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif itu dapat dijalankan.
- Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya yang kongkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan mamfaat simbolis pada kelompok sasaran kebijakan tersebut.

Di dalam pembuatan kebijakan ini, ada beberapa macam model dalam pembutaannya, misalnya seperti tipologi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, seorang ahli Nicholas Henry (1980) di dalam bukunya yang berjudul *Doing Public Administration* mengelompokkan tipologi ini menjadi dua klasifikasi, yakni pertama, kebijakan ditinjau dari sudut pandang proses, dan yang kedua, kebijakan publik ditinjau dari sudut pandang hasil dan akibat atau efeknya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perumusan kebijakan, terdapat hal-hal penting yang tidak bisa lepas dalam perumusannya. Bagi masyarakat luas baik itu antar individu atau kelompok di dalamnya, kebijakan tidak boleh lepas dari aspek nilai, etika, norma dan pedoman moral tertentu, yang selalu mewarnai kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat privat ataupun publik. Aspek etika dan moral dalam analisis kebijakan akan memberikan kerangka dalam menganalisis dan merekomendasikan aksi-aksi kebijakan, agar kemanfaatan output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat yang nantinya akan menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Pada saat proses analisis kebijakan terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan di antaranya :

1. Perumusan Strategi

Tahap ini merupakan tahap penting dalam proses pengendalian manajemen kebijakan, karena jika salah dalam perumusan akan mengakibatkan kesalahan dalam arah organisasi. Sebagai contoh jika suatu kapal ingin berlayar dari Jakarta menuju Surabaya, seorang kapten harus memfokuskan untuk berlayar ke arah Surabaya, jika arah perjalanan salah, strategi kurang tepat dan sumber daya yang kurang memadai, tentu kapal itu tidak akan sampai ke Surabaya.

Dalam organisasi, penentuan arah dan tujuan suatu kebijakan berupa merumuskan visi, misi, tujuan dan nilai dasar organisasi. Perumusan ini merupakan

kegiatan merancang masa depan, kegiatan ini membutuhkan ketajaman visi dan intuisi karena hal ini dapat melihat realitas masa depan yang melampaui masa depan kini. Hal ini sangat berpengaruh besar pada dalam menentukan suatu kebijakan, visi-lah yang menyatukan orang, bukan semata-mata kharisma seorang pemimpin.

Perumusan ini merupakan tahap pembangunan mental, moral dan spritual. Tahap selanjutnya berkaitan dengan pembangunan fisik berupa pemograman, penganggaran dan implementasi. Pembangunan fisik akan lebih mudah jika mental, moral dan spritual sudah dibangun kokoh. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin membangun sebuah stadion betaraf Internasioanal dan terbesar di Asia, pemerintah tidak serta merta membeli tanah dan bahan material untuk pembangunan. Stadion yang megah dan bertaraf Internasional itu tidak akan pernah berdiri jika tidak ada visi, misi, tujuan dan nilai dasar yang mendasarinya. Visi, misi, tujuan dan nilai dasar ini jika hanya dimiliki oleh kepala daerah atau seorang menajer tidak akan terwujud juga, hal ini harus ditularkan, dibagi dan dikomunikasikan ke seluruh personel yang ada dalam organisasi agar tercipta visi, misi, tujuan dan nilai bersama.

2. Perencanaan yang strategis

Di dalam visi, misi, tujuan dan nilai yang sudah ada tadi kita implementasikan ke dalam perencanaan yang strategis berupa program-program yang kongrit. Perencanaan yang strategis merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program

yang baru. Produk perencanaan ini berupa rencana-rencana strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis, dan target.

Rencana strategis merupakan hasil penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan nilai bersama. Sasaran strategis merupakan hasil penerjemahan strategi ke dalam sasaran-sasaran yang hendak yang dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan. Target merupakan tonggak-tonggak yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi. Perencanaan ini juga merupakan jembatan yang menghubungkan antara perumusan strategi dengan penganggaran secara tidak langsung.

3. Penyusunan Program

Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan yang strategis. Rencana-rencana yang strategis, sasaran yang strategis dan inisiatif strategis merupakan kerangka konseptual yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program. Program merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategis tertentu beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

Penyusunan program-program ini berdasarkan pada empat kriteria di antaranya :

a Kesesuaian (Fit)

Kriteria ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan atau kesesuaian program yang dilaksanakan organisasi. Kriteria program bisa dinilai sesuai (tepat) meliputi :

- Sesuai dengan tujuan dan misi organisasi
- Kemampuan untuk bisa menggunakan keahlian yang saat ini dimiliki atau ada dalam organisasi; dan
- Kemampuan sumber daya yang tersedia dan adanya keselarasan aktivitas dengan program

b. Kemerarikan Program (Attractiveness)

Kemerarikan program adalah di mana program yang diajukan menarik bagi organisasi yang dilihat dari perspektif ekonomi. Program yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi diklasifikasikan sebagai program yang tidak menarik. Program dinilai menarik apabila mengandung kriteria berikut :

- Sangat menarik bagi investor yang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dana
- Pendanaan yang stabil (relatif pasti dan jelas)
- Program tersebut merupakan permintaan pasar dari sebagian masyarakat
- Menarik bagi kelompok volunteer
- Hasil program bisa diukur dan dilaporkan
- Berfokus pada pencegahan (preventif) dan bukan pengobatan (kuratif)

- Jika terpaksa dihentikan, bisa dihentikan dengan biaya (kerugian) yang kecil (low exit barriers)
- Resistensi yang rendah dari pelanggan terhadap program tersebut

c Cakupan Pilihan (Alternative Coverage)

Cakupan pilihan adalah keluasan pilihan program atas suatu pelayanan yang diberikan organisasi lain. Jika dalam suatu wilayah tertentu banyak program yang dapat memberikan pilihan layanan yang lebih banyak, maka program tersebut bisa diklasifikasikan cakupan alternatifnya tinggi, tapi jika sebaliknya jika sedikit yang memberikan pelayanan, maka cakupan alternatifnya rendah.

d Posisi Bersaing (competitive Position)

Posisi bersaing adalah kemampuan organisasi dalam melaksanakan program dibandingkan dengan organisasi lain. Posisi bersaing ini merupakan kombinasi dari efektivitas organisasi, kualitas, kredibilitas, dan dominan pasar. Program bisa diklasifikasikan memiliki posisi bersaing yang kuat antara lain mengandung kriteria berikut :

- Lokasi program tepat
- Mendapat dukungan yang luas dari masyarakat
- Memperoleh dukungan sumber dana
- Memiliki track record atau image yang baik
- Pangsa pasar yang dilayani besar

- Waktunya (momentum) tepat
- Paling efisien dan efektif ditinjau dari segi biaya programnya

4. Penganggaran

Program-program yang sudah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya. Biaya program tersebut merupakan gabungan dari biaya aktivitas untuk melakukan program yang sudah ada. Secara agregatif biaya tersebut akan diringkas dalam bentuk anggaran. Selain anggaran biaya, juga dibuat anggaran pendapatan dan anggaran investasi (modal) untuk melaksanakan program.

5. Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, kepala daerah atau manajer bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan output-nya dalam sistem akuntansi keuangan.

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.

Menurut Merilee S. Grindle didalam bukunya yang berjudul Politics and Policy Implementation in the world yaitu suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (content of policy) dan variabel lingkungan implementasi kebijakan (context of implementatiton).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal:

- Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat?
- Jenis manfaat yang diterima oleh target groups atau sasaran kebijakan, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari sasaran kebijakan.
- Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik, seperti membangun jembatan atau jalan raya akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia?
- Apakah letak sebuah program sudah tepat? Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementator kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi, contohnya dalam hal penutupan ini.

- Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementatornya dengan rinci. Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implementator kebijakan? Kejelasan implementator kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementator untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik.
- Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai? Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam setiap implementasi. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya financial maupun kompetensi dari implementator.

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan mencakup tiga aspek berikut ini:

- Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- Karakteristik institusi dan rezim yang terbuka.
- Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Proses suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor apakah kebijakan publik itu layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebijakan publik. Faktor-faktor itu sebagai berikut:

6. Evaluasi Kinerja

Pelaporan kinerja organisasi harus memiliki dua manfaat utama yaitu bagi pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal laporan kinerja digunakan sebagai alat

pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajer dan staf. Bagi pihak eksternal laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban organisasi. Laporan kinerja, bagi manajer memungkinkan untuk membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan realisasinya. Jika terdapat penyimpangan yang signifikan, manajer dapat melakukan tindakan koreksi sebagai umpan balik. Evaluasi kinerja dalam sistem pengendalian manajemen meliputi :

- Evaluasi kinerja organisasi

Ini merupakan penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja organisasional berdampak pada pemberian penghargaan, kritik yang sifatnya membangun, kenaikan pangkat, penugasan kembali, atau pemberhentian dan pemecatan kepada manajer pusat pertanggungjawaban.

- Evaluasi program

Evaluasi kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program. Pelaksanaan program yang tidak optimal memerlukan revisi anggaran program. Jika evaluasi program menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan tidak efektif, maka manajer perlu mengkaji ulang terhadap strategi untuk mencapai tujuan, atau bahkan merevisi tujuan.

7. Umpan Balik

Tahap terakhir adalah pemberian umpan balik (feedback). Tahap ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak lanjut (follow up) atas prestasi yang dicapai.

Apabila berdasarkan penilaian kinerja dinyatakan organisasi belum berhasil mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, maka kemungkinan perlu dilakukan penetapan ulang atas perumusan strategi organisasi.

2. Mitos

Mitos merupakan bagian tradisi lisan yang memuat sejumlah nilai moral yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, di antaranya untuk pembinaan watak, pendidikan multikultural, dan upaya menumbuhkan rasa kebangsaan. Secara harfiah kata mitos berasal dari bahasa Yunani ‘muthos’; ‘mythos’ yakni memiliki arti sesuatu yang diungkapkan, sesuatu yang diucapkan, misalnya cerita. Menurut Sukatman (2011:1) mitos adalah cerita yang bersifat simbolik dan suci yang mengisahkan serangkaian cerita nyata ataupun imajiner yang berisi asal-usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewa, kekuatan supranatural, pahlawan, manusia, dan masyarakat tertentu yang berfungsi untuk (a) meneruskan dan menstabilkan kebudayaan, (b) menyajikan petunjuk-petunjuk hidup, (c) mengesahkan aktivitas kebudayaan, (d) memberi makna hidup manusia, (e) memberikan model pengetahuan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak masuk akal dan pelik. Pengertian mitos relatif beragam, karena disusun oleh bermacam-macam ahli dengan sudut pandang yang berbeda.

Mitos bukan sekedar dongeng, mitos memberikan model dan arkhetype yang dijadikan referensi tindakan dan sikap hidup manusia. Tindakan yang dimaksud

adalah tindakan spiritual religius, bukan tindakan profan sehari-hari. Mitos mengandung kebenaran yang membentuk kekuatan-kekuatan religius-magis bagi kehidupan manusia. Namun dalam kehidupan manusia modern, mitos mulai ditinggalkan. Akan tetapi, manusia modern tidak bisa sepenuhnya terlepas dari mitos. Ketergantungan itu ditunjukkan dengan masih adanya sikap-sikap mistis, utamanya saat manusia modern terbentur dengan kesulitan hidup yang di luar jangkauan kekuatan manusia. Mitos-mitos dalam manusia modern merosot dalam bentuk legenda, epos, dan balada.

Dalam kehidupan masyarakat mitos mempunyai ciri bersifat sakral atau disucikan oleh masyarakat pemilik, imajiner sehingga cenderung tidak bisa dijumpai dalam dunia nyata, dan merupakan sumber tatanilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pemilik mitos dan nyata-tidaknya mitos tidak menjadi persoalan penting.

Klasifikasi jenis mitos yang ada amat beragam, menunjukkan bahwa sudut pandang penggolongan mitos amat beragam. Berdasarkan keluasan isi dan substansi isinya, menurut Sukatman (2011:6-7) mitos dapat dikelompokkan menjadi (1) mitos awal penciptaan, (2) mitos kosmogoni, (3) mitos asal-usul, (4) mitos makhluk adikodrati, (5) mitos antropogenik, (6) mitos kepahlawanan (heroisme), (7) mitos transformasi, (8) mitos languagenik, (9) mitos ekhsatoik, (10) mitos ritual atau penyembahan.

Mitos difungsikan sebagai sarana untuk mengajarkan sains tentang aturan alam semesta (kosmos) kepada manusia. Pada masa primitif manusia mengenal dan memahami alam yang mereka diami melalui mitos. Mitos juga difungsikan sebagai upaya mendukung dan memapankan tatanan sosial. Melalui mitos manusia menata kehidupan sosial dengan mengukuhkan berbagai aturan. Dalam kondisi ini akhirnya mitos menjadi sumber pola tindakan manusia dalam berinteraksi sosial.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah diperlukan metode untuk memperoleh hasil yang akurat dan tepat sasaran, oleh karena itu keakuratan penelitian di tetapkan pada metode yang di gunakan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan turun langsung meninjau lapangan di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Metode penelitian kualitatif menurut Moleong (1998), adalah penampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang di cermati oleh peneliti, dan benda-benda yang di amati sampai detilnya agar dapat di tangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

³ <http://maliassyah.blogspot.co.id/2013/11/resensi-buku-mitos-dalam-tradisi-lisan.html?m=>; diakses 06 September pukul 20.26

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan di Kantor Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang memberikan informasi tentang kondisi, situasi dan kebenaran yang ada di lapangan sesuai dengan yang akan di teliti. Menurut Moleong seorang informan berkuajiban secara sukarela menjadi tim peneliti, walau bersifat nonformal.⁴

Di dalam proses penelitian ini peneliti mengambil informan diantaranya :

- Sayekti selaku Kepala Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mewakili Pemerintah Desa yang berwenang atas Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- Syarifuddin selaku Kepala Dusun di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mengetahui seluk-beluk Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- Murijan selaku jurukunci Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

⁴ Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Rosdakarya. Bandung, : 90

- Rohma selaku penemu dan kolektor peninggalan Kerajaan Gelang-Gelang di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun .
- 4 (empat) masyarakat di Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun .

4. Teknik Penentuan Informan

Informan di dalam penelitian kualitatif sangat penting guna mendapatkan informasi yang akurat, dengan demikian yang akan di jadikan Informan harus mempunyai kriteria.

- a. Mengetahui lingkup yang akan peneliti teliti
- b. Sedang terlibat dalam kegiatan yang akan di teliti
- c. Memiliki waktu untuk di wawancarai
- d. Berkata jujur dan tidak mengada-ngada cerita

Informasi yang di ambil menggunakan kriteria guna untuk menyaring keabsahan dan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk lebih meyakinkan peneliti dan memperbanyak sumber karena teknik ini merupakan dasar dari penelitian kualitatif.

Oleh karena itu narasumber harus benar-benar mengetahui tentang sejarah Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau sedang berkecimpung di Pemerintahan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang di perlukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrument sebagai berikut :

- 1) Wawancara mendalam, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka pada informan atau sejumlah pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah yang di teliti untuk memperoleh data yang lengkap dan yang mendalam.
- 2) Observasi atau Pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang di temukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan dengan permasalahan penelitian

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang untuk mendukung data primer.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut :

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat dari ahli yang memiliki relavansi dengan masalah yang di teliti.
- 2) Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang di peroleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasipenelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut yang diteliti dengan instansi terkait,⁵

6. Teknik Analisa Data

Analisa data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak bisa menggunakan symbol-simbol yang sama di dalam data kualitatif. Kerena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini berdasarkan kepada sejumlah teori (Creswell, 1994; Patton, 1990; Bogdan dan Taylor, 1984) dan di sesuaikan dengan tujuan penelitian.⁶

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data

⁵ Frans Novendra W.P, *Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, hal; 31.

⁶ <http://widodoiain.blogspot.co.id/2015/02/teknik-analisis-data-dalam-penelitian.html?m=1>. Diakses 20 agustus 2016 pukul 08:05

kualitatif ini adalah analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta, data dan informasi.

Wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti dan kemudian akan di tarik kesimpulan.

